

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini pada mulanya terdorong oleh beberapa literatur terbaru dalam Studi Hubungan Internasional. Literatur dalam Studi Hubungan Internasional konvensional pada awalnya lebih terkait isu-isu politik murni mengenai hubungan antar bangsa seperti perang dan damai, perimbangan kekuatan (*balance of power*), stabilitas tatanan internasional dan lain-lain, para ahli menyebutnya dengan apa yang disebut sebagai *high politic*. Perkembangan lebih lanjut terkait dengan isu-isu lain yang lebih *low politic* seperti isu ekonomi, social, budaya dan HAM. Perkembangan tersebut tentunya terkait dengan perkembangan situasi internasional yang sangat dinamis. Apa yang dibicarakan oleh ilmu pengetahuan tentunya berkorelasi erat dengan objek yang dikajinya, begitu pula sebaliknya. Karenanya tidak dapat disangkal bahwa kompleksitas kajian yang terus digali. Dalam dunia sosial saat ini sulit sekali mempertahankan paradigma lama yang reduksionistik dengan anggapan bahwa tatanan internasional ( *order* ) dapat dikaji dalam satu isu sederhana dan tunggal. Tidak ada yang lebih baik kecuali lebih adaptif terhadap pluralitas wacana, dan tidak ada yang dapat bertahan dalam dunia sosial kecuali berdialektika dan menyikapinya dengan bertumpu pada kontekstualitas.

Ilmu Hubungan Internasional memang lebih muda usianya namun perkembangan objek kajiannya yang dinamis membuat akselerasi dalam kematangan teori dan isu yang diangkatnya. Salah satu isu tersebut berkait dengan era baru atau *new order* dalam bidang politik, social, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.

Sejak Perang Teluk II berakhir, hubungan negara Iran dan negara Amerika Serikat semakin memburuk, bahkan sampai sekarang setelah terpilihnya presiden baru Iran, Najjad terus berlanjut. Memburuknya hubungan Iran dan Amerika Serikat dipicu oleh berbagai tuduhan Amerika yang terus dialamatkan ke Iran. Tuduhan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan citra pemerintahan Republik Islam Iran di mata dunia. Tuduhan Amerika antara lain bahwa Iran mendukung kelompok Syiah Irak, tidak kooperatif dalam upaya menstabilkan Irak yang hingga kini terus bergolak. Amerika juga menuduh Iran terus membantu para pejuang Hizbullah dan Jihad Islam, dua kelompok perjuangan yang bertekad mengusir pendudukan Israel dari Lebanon dan Palestina. Seperti biasa, baik Amerika maupun Israel telah menuduh secara sepihak bahwa kedua organisasi tersebut merupakan kelompok teroris. Amerika juga telah mengelompokkan Iran sebagai salah satu negara "poros kejahatan". Tuduhan terakhir Amerika dan selalu diulang-ulang adalah bahwa Iran secara tersembunyi tengah mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan ini telah memicu ketegangan yang semakin meruncing antara kedua belah pihak.

Dalam Sidang Umum PBB 2005, masalah program nuklir Iran menjadi salah satu isu panas yang menonjol. Terkesan ada nuansa perang urat syaraf antara Amerika Serikat dan Iran, begitu Iran menyatakan kukuh dengan program nuklirnya dan bersikeras meneruskannya, disamping juga menawarkan kompensasi, Amerika Serikat bersama Uni Eropa dan Badan Tenaga Atom Internasional ( IAEA ) mengancam pengelaran sidang DK-PBB. Geopolitik Iran yang sangat strategis dan mampu mempengaruhi hawa politik kawasan Timur Tengah tampaknya membuat Amerika Serikat harus terus berupaya menciptakan kondisi yang tidak stabil dan penuh ancaman bagi Iran. Hal ini dilandaskan pada suatu kekhawatiran, apabila Iran kuat secara politis dan mampu memfasilitasi sekaligus mengembangkan solidaritas islam dan penentangan terhadap dominasi Amerika Serikat dan Barat di Timur Tengah, maka akan banyak sekali kepentingan Amerika Serikat yang terancam, disamping tingginya biaya politik, militer, dan kepentingan yang harus ditebus oleh Amerika Serikat. Ancaman nuklir Iran tersebut akan menjadi sebuah topic pembicaraan yang sangat menarik. Penulis akan mengkaji persoalan tersebut dengan tema besar: “ *Kepentingan Amerika Serikat Dalam Pelarangan Pengembangan Nuklir Iran* “ yang setidaknya menurut hemat penulis dapat memberikan gambaran tentang isi skripsi ini.

## **B. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui lebih dalam permasalahan senjata pemusnah massal di Timur Tengah, khususnya di negara Iran.
2. Untuk mengetahui hubungan diplomatik antara negara Amerika Serikat dengan negara Iran sebelum dan pasca isu kepemilikan senjata pemusnah massal.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha dan sikap yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dalam isu kepemilikan senjata pemusnah massal sebagai bentuk pelanggaran Hukum Internasional.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Di dalam dunia teknologi, nuklir adalah sebuah energi yang sangat luar biasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia dan sangat penting dalam industri, listrik, kedokteran dan kebutuhan-kebutuhan positif. Dengan nuklir, segala kebutuhan energi untuk produksi dan teknologi manusia bisa ditekan dengan tingkat keefektifan yang sangat tinggi. Pengembangan teknologi nuklir dalam berbagai bidang menjadi sebuah kompetisi dari negara-negara di seluruh dunia. Satu demi satu dari beberapa negara menemukan berbagai penemuan dan teknologi baru yang sangat berguna bagi kehidupan manusia.

Namun, nuklir juga sangat efektif dan bisa sangat berbahaya bila dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal. Senjata nuklir sudah melegenda sebagai senjata yang sangat dahsyat dalam menghancurkan dan memusnahkan obyeknya. Manusia yang selamat dari senjata nuklir tidak

mungkin lepas begitu saja, karena radiasi yang akan ditanggung selama sisa hidupnya bisa membuatnya lumpuh bahkan merusak gen atau keturunan. Jadi bisa dibayangkan betapa kekuatan nuklir bisa memusnahkan beberapa generasi dan mematikan reproduksi manusia.

Perang dingin adalah sebagai masa puncak dimana teknologi nuklir dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal. Selama periode perang urat syaraf ini, negara-negara terbentuk dalam dua kubu yang saling mengancam. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba dalam membuat dan mengembangkan nuklir menjadi senjata pemusnah massal baik dalam kualitas dan kuantitas.

Perang mental dan propaganda gencar dilakukan kedua kubu, hal ini juga bermaksud agar banyak negara-negara lain ingin masuk menjadi anggota baru ke salah satu atau blok tersebut. Ketakutan luar biasa terjadi dan dialami oleh negara-negara yang tidak memihak ke salah satu blok, ketakutan bila terjadi perang mereka akan ikut menanggung akibat dari efek senjata nuklir yang bisa menghancurkan umat manusia di seluruh dunia.

Hingga berakhirnya perang dingin, nuklir masih menjadi sebuah agenda yang sangat penting dan mendapat perhatian yang sangat serius. Bahaya nuklir menjadi orientasi lahirnya kesepakatan bersama tentang peraturan kepemilikan nuklir dan pencegahan penyebaran nuklir sebagai senjata pemusnah massal. NPT ( Nuclear non-proliferation Treaty ) adalah nama kesepakatan tersebut yang berisi kesepakatan bersama tentang

pelarangan, pembatasan dan pelarangan nuklir sebagai senjata pemusnah massal.

NPT ini membagi dua kelompok besar tentang kepemilikan nuklir, negara yang telah melakukan uji coba nuklir sebelum tahun 1968 dan negara yang belum melakukan uji coba nuklir sebelum 1968. Negara-negara dalam kelompok pertama adalah Inggris, Perancis, Cina, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Negara kelompok pertama merupakan negara maju. Dan negara kelompok dua mayoritas negara berkembang. NPT berisi kesepakatan tentang pelarangan pengembangan dan kepemilikan nuklir sebagai senjata pemusnah massal bagi negara kelompok kedua dan memberi keleluasaan bagi kelompok negara pertama untuk memiliki nuklir.<sup>1</sup>

Tidak adil memang, hak kepemilikan senjata nuklir hanya untuk negara-negara maju saja. Badan Tenaga Atom Internasional ( IAEA ) adalah badan milik PBB yang khusus mengawasi negara-negara berkembang dalam pencegahan pengembangan senjata nuklir. IAEA dapat melaporkan negara yang kedapatan memproduksi nuklir sebagai senjata pemusnah massal ke Dewan Keamanan PBB dan mendapat resolusi sebagai sanksi Internasional. Amerika Serikat sebagai polisi dunia, rupanya juga mempunyai peran yang sama dengan badan IAEA, malah lebih aktif dalam mengawasi negara-negara yang dicurigai mengembangkan nuklir.

Meskipun era perang dingin telah berlalu, Amerika Serikat tampaknya masih menganggap kepemilikan nuklir (dan keunggulan

---

<sup>1</sup> "Information and Issues on Multilateral Cooperation and Regulation of nuclear Science and Technology", *One day Workshop of P2P - LIPI, Jakarta, 28 April 2005.*

persenjataan lainnya) sebagai alat penjaga perdamaian dunia. Dalam batas tertentu anggapan ini memang mengandung kebenaran, kesegaran pada Amerika Serikat dapat menciutkan nyali negara-negara yang ingin melanggar hukum internasional. Tindakan Amerika Serikat bersama sekutunya menggelar perang setelah Saddam Husein menganeksasi Kuwait, dapat dijadikan contoh yang membuat negara lain yang ingin melakukan hal serupa harus menahan diri dan berpikir seribu kali. Namun di sisi lain, terbukti Amerika Serikat juga telah memanfaatkan keunggulan militer dan politiknya untuk membela pelanggaran hukum internasional sendiri, seperti yang telah berkali-kali dilakukan Israel. Lebih celaka lagi kalau Amerika Serikat sendiri yang menjadi pelakunya, dalam pendudukan Irak, lebih-lebih setelah ternyata Irak tidak terbukti menyimpan senjata pemusnah massal. Jelas-jelas adalah pelanggaran hukum internasional yang sulit dibenarkan.

Kebijakan Amerika Serikat yang tidak konsisten juga dapat kita lihat dalam kasus India misalnya, Amerika Serikat semula selalu mengancam keras pengembangan nuklir yang dilakukan. Namun manakala melihat kemajuan militer China yang tampak pesat dan semakin modern, sikapnya segera berubah, bahkan berbalik 180 derajat. Belakangan Amerika Serikat justru menginginkan India tampil sebagai kekuatan nuklir yang lebih kuat di Asia, dengan memberinya akses untuk mendapatkan teknologi bahan nuklir Amerika Serikat. Lawatan Perdana Menteri Manmohan Singh ke Washington, juli 2005, mengisyaratkan kemajuan signifikan dalam hubungan kedua negara, termasuk dalam kerjasama nuklir.

Penjungkirbalikan sikap serupa pun ditunjukkan terhadap Pakistan. Ketika Pakistan menguji-coba senjata nuklirnya, 1998, Amerika Serikat sangat menentangnya. Tapi setelah pengeboman 11 September 2001, manakala Amerika Serikat membutuhkan bantuan untuk mengatasi ketakutannya terhadap terorisme, tiba-tiba status Pakistan berubah, dari “pelanggar yang harus dihukum menjadi ”sekutu yang harus disupport”. Jadi naga-naganya, bagi Amerika Serikat selama ini urgensi dalam setiap masalah internasional bukannya benar atau salah, bukan pula baik atau buruk bagi dunia. Satu-satunya hal yang urgen hanyalah kepentingan nasionalnya yang egosentris, sehingga aturan hukum ditekek-tekek sekehendak hati.

Saat ini Iran merupakan negara yang mendapat giliran dituduh mengembangkan nuklir sebagai senjata pemusnah massal, berkaitan dengan isu adanya aktifitas pengayaan uranium sebagai bahan dasar senjata nuklir. Menurut Amerika Serikat aktifitas tersebut merupakan kesalahan terbesar dari Iran. <sup>2</sup>Hal itu menunjukkan betapa Amerika Serikat benar-benar serius dalam menangani nuklir Iran. Bahkan Presiden George Walker Bush didampingi Wakil Presiden Dick Cheney dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice dalam kesempatan yang sama di sela-sela pertemuan mengenai nuklir di kota Mainz, Jerman pada tanggal 23 Februari 2005 yang lalu juga mengatakan bahwa:

---

<sup>2</sup> “ Bush: AS tak akan toleransi nuklir Iran”, *KapanLagi.Com*, 24 Januari 2005.

“ Sangat penting bagi Iran untuk mendengar para pemimpin dunia yang berbicara dalam satu suara agar negara itu tidak mengembangkan senjata nuklir. Kami sangat setuju bahwa Iran harus mengatakan tidak pada senjata nuklir jenis apapun, Iran tidak boleh memiliki senjata, demi keamanan dan perdamaian dunia “<sup>3</sup>

Prosedur atas keputusan Amerika Serikat dalam menekan dan memaksa Iran tidak bisa dilakukan sendiri, aturan dalam Dewan Keamanan PBB bahwa pelimpahan masalah suatu negara harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu oleh anggota Dewan Keamanan PBB yang lain seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Tanpa persetujuan ke tiga negara tersebut ditambah Rusia, keputusan Amerika Serikat untuk menghakimi Iran dengan resolusi bahkan berlanjut ke sanksi intervensi militer tidak bisa dilakukan.

Perlu diketahui bahwa keputusan ke tiga negara tersebut yang juga sekaligus wakil dari Uni Eropa dalam mengeluarkan resolusi sejak isu kepemilikan nuklir Iran pertama kali dikeluarkan tahun 2004 belum sepenuhnya disetujui. Keputusan diambil berdasar hasil perkembangan dari Badan inspeksi IAEA yang diketahui Mohamed El Baradai yang telah melakukan serangkaian survey ke instalasi dan pabrik-pabrik yang dicurigai sebagai sarana pengayaan uranium di Iran.

Inggris, Perancis, dan Jerman sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dalam kasus Iran tidak hanya bertugas untuk mengesahkan, tapi juga menawarkan alternative lain sebagai desakan kepada Iran untuk menghapuskan nuklir, yaitu menawarkan berbagai alternative bantuan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

ekonomi sebagai ganti dari program nuklir, jika nuklir Iran terbukti dikembangkan sebagai sebuah energi bagi pembangkit listrik.<sup>4</sup>

Iran yang sejak awal mengakui bahwa tuduhan Amerika Serikat tidak benar, mengatakan bahwa program nuklirnya yang merupakan hasil kerjasama dengan Rusia tersebut hanya untuk damai, karena program nuklirnya adalah untuk tujuan ekonomi dan pembangunan tenaga listrik berkekuatan nuklir, hal ini juga telah ditegaskan sendiri oleh Presiden Ahmadinejad. Bahkan NPT juga tidak mempermasalahkan program nuklir yang digunakan untuk tujuan damai, apalagi program nuklir Iran juga mendapatkan pengawasan dari pihak Rusia. Saat ini Iran jadi bisa merasa lebih tenang ketika Uni Eropa dan Rusia tidak menggubris ajakan Amerika Serikat agar turut menekan Iran soal isu nuklir. .

Melihat kondisi tersebut, seharusnya Amerika Serikat tidak terlalu bersikap keras dalam menentang program nuklir Iran, karena nuklir Iran hanya untuk tujuan damai dan tidak dipermasalahkan oleh NPT. Tetapi, Amerika Serikat yang sejak semula mengeluarkan kebijakan menentang segala kegiatan nuklir Iran masih tetap bersikeras pada pendiriannya, Amerika Serikat sampai saat ini masih tetap berupaya mencari dukungan dari negara-negara sekutunya dan Uni Eropa untuk menghadang Iran dan menentang program nuklirnya. Tentu hal ini membuat Iran yang sekarang sedang terseok-seok dalam membangun perekonomiannya bisa mengalami kesulitan, karena

---

<sup>4</sup> *Buletin Sinai Edisi Kedua* – Akhir Agustus 2005

bisa saja suatu saat Iran dijadikan kambing hitam oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu:

“ Mengapa Amerika Serikat menentang keras program pengembangan nuklir Iran ? “

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

##### **Teori Pembuatan Keputusan**

Untuk menganalisa suatu permasalahan yang kita hadapi dalam hubungan internasional, kita memerlukan penjelasan dengan menggunakan teori, yaitu sebuah penjelasan mengapa sesuatu bisa terjadi. Selain dipakai sebagai eksplanasi, teori juga dipakai sebagai dasar prediksi.

Keputusan adalah, dalam istilah David Easton, “output” (keluaran) sistem politik, yang dengan sistem itu nilai-nilai dialokasikan dalam masyarakat secara otoritarian (dengan penggunaan kekuasaan). Konsep pembuatan keputusan telah termuat secara implisit dalam beberapa pendekatan kuno pada sejarah diplomasi dan studi tentang institusi politik. Para psikolog tertarik pada motif-motif yang mendasari keputusan individual dan mengapa sebagian orang mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain dalam membuat keputusan. Para ahli ekonomi

memfokuskan pada keputusan yang diambil para produsen, konsumen, investor dan mereka-mereka yang pilihannya mempengaruhi perekonomian. Para teoritisasi administrasi bisnis berusaha menganalisis dan meningkatkan efisiensi pembuatan keputusan eksekutif. Dalam pemerintahan dan khususnya dalam perencanaan pertahanan pada tahun 1960an, teknik yang secara luas dikenal sebagai "cost effectiveness" (keefektifan biaya) digunakan dalam proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan merupakan fokus perhatian para ilmuwan politik yang tertarik pada analisis perilaku keputusan para pemberi suara, legislator, pejabat eksekutif, politikus, pemimpin kelompok kepentingan, dan aktor-aktor lain dalam arena politik.<sup>5</sup> Karenanya, studi tentang pembuatan keputusan politik luar negeri mengkonsentrasikan pada satu segmen dari sebuah fenomena minat yang lebih luas bagi para ilmuwan sosial dan pembuat keputusan. Karena banyak analisis memfokuskan perhatian mereka pada pembuatan keputusan dalam situasi krisis.

Pembuatan keputusan adalah sekedar tindakan memilih alternatif yang tersedia yang di situ terdapat ketidakpastian. Dalam politik luar negeri, karena wilayah politik luar negeri biasanya kurang dikenal, jarang terdapat alternatif kebijakan yang kurang "pasti." Alternatif-alternatif tersebut dirumuskan dengan meraba-raba dalam konteks dari suatu situasi keseluruhan dimana akan muncul perselisihan terhadap perhitungan situasi yang mana yang paling valid, pilihan-pilihan apa yang ada, konsekuensi yang muncul dari berbagai pilihan, dan nilai-nilai yang harus digunakan sebagai kriteria untuk

---

<sup>5</sup> Lihat Paul Wasserman dan Fred S. Silander, *Decision Making: An Annotated Bibliography* (Ithaca, N. Y. : Graduate School of Business and Public Administration, Cornell University, 1958).

membuat ranking pilihan dari yang paling dikehendaki sampai yang paling dihindari. Terdapat kontroversi terhadap hakekat pembuatan keputusan dan terhadap paradigma yang sesuai bagi studi ini.

Menurut model pembuatan keputusan klasik, para pembuat kebijakan membuat sebuah perhitungan dalam dua dimensi dasar manfaat dan kemungkinan dan, dengan asumsi bahwa mereka "rasional," mereka berupaya memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Dengan kata lain, setelah semua alternatif yang ada dikaji dan hasil dari nilai serta kemungkinan yang diperkirakan sudah diperoleh, para pembuat keputusan bisa membuat pilihan optimal mereka.<sup>6</sup>

Menurut Graham T. Allison, sebagian besar analisis politik luar negeri memikirkan dan menjelaskan tentang perilaku pemerintah dalam kerangka model Aktor Rasional atau model "Klasik", di dalam model mana pilihan kebijakan dilihat sebagai tindakan yang sengaja dari pemerintah-pemerintah yang bersatu yang didasarkan pada sarana logis mencapai tujuan-tujuan tertentu. Model ini mewakili sebuah usaha untuk menghubungkan tindakan dengan perhitungan yang masuk akal.<sup>7</sup> Negarawan versi Morgenthau merenungkan apa yang dituntut oleh kepentingan nasional dalam sebuah situasi tertentu, teori permainan Schelling menghitung syarat-syarat deterrens yang stabil bagi kedua belah pihak atau titik-titik ketegangan dimana perang-

---

<sup>6</sup> Lihat misalnya Marshall Dimocck, *A Philosophy of Administration* (New York: harper & Row, 1958), p. 140; J. David Singer, "Inter-nation Influence: A. Formal Model," *American Political Science Review*, LXII (June 1963), 424; Bruce M. Russett, "The Calculus of Deterrence," *Journal of Conflict Resolution*, VII (June 1963), 97-109.

<sup>7</sup> Graham T. Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (Boston: Little, Brown, 1971), pp 4-5, 10-11.

perang terbatas bisa tetap dibuat terbatas, analisis strateginya Herman Kahn memainkan skenario perang nuklir dengan proses matematika perhitungan untung rugi, semuanya menggunakan bentuk model aktor rasional. Orang yang rasional menjelaskan secara rinci tujuan-tujuan mereka, pilihan-pilihan yang tersedia, dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari tiap pilihan alternatif sebelum membuat keputusan.

Dalam skripsi yang saya angkat, teori ini sangat berguna terutama dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, kebijaksanaan politik luar negeri merupakan suatu sarana untuk mencapai kepentingan nasionalnya sehingga pelaksanaan dan perumusannya tentu mengacu pada kondisi dalam negerinya.

Langkah Amerika Serikat yang berkeinginan untuk menghapus keberadaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah, dan melarang negara Iran untuk mengembangkan nuklir adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan Internasional. Karena tidak mungkin Amerika Serikat berani mengintervensi dan mengibarkan bendera perang hanya dengan biaya yang kecil, Amerika membutuhkan biaya yang sangat besar untuk biaya akomodasi pasukan dan senjata. Sehingga tentu saja harus ada peruntungan atau timbal balik dari hasil misinya tersebut.

Selain itu Amerika Serikat ingin menguasai pasar senjata dan keamanan dengan mencegah pembentukan kekuatan oleh negara-negara di Timur Tengah. Yang merupakan bagian dari kepentingan nasionalnya, karena

tindakan Amerika Serikat di negara Iran juga menggunakan kekuatan militer dan berharap meningkatkan prestise dalam sistem Internasional.<sup>8</sup>

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Rourke menuliskan bahwa kepentingan nasional adalah hal yang membingungkan para ilmuwan bidang politik. Istilah ini sangat sering digunakan oleh pemimpin politik untuk menjelaskan tindakan yang dilakukannya. Ahli politik Perancis berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang sulit untuk didefinisikan secara komprehensif. Pluralitas tujuan yang konkrit dan tujuan pokok menghambat untuk merumuskan definisi rasional dari kepentingan nasional. Meskipun demikian seringkali jika mengatakan kepentingan nasional maka yang kita maksud adalah sasaran yang ingin dicapai oleh negara atau pemerintah yang berkuasa saat ini.

Setiap negara akan merumuskan kepentingannya masing-masing. Dalam menentukannya sangat dipengaruhi oleh percampuran antara pengalaman sejarah, ideologi dan kebutuhan negara saat ini. Seringkali istilah kepentingan nasional ini dimanfaatkan untuk tujuan yang mulia, namun tidak jarang pula disalahgunakan untuk sesuatu yang kurang baik.<sup>9</sup>

Menurut Morgenthau dalam Mas'ood, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Sementara Plano

---

<sup>8</sup> John T. Rourke, *International Politics on The World Stage* (Hartford: University of Connecticut, 1986)

<sup>9</sup> Hans J. Morgenthau dan Thompson W. Kenneth, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace 6<sup>th</sup> ed*, New York: Alfred A. Knopf, inc

dan Orton menerangkan kepentingan nasional adalah tujuan dasar dan penentu yang menuntun pemimpin negara dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Biasanya kepentingan nasional mencerminkan kebutuhan vital yang dituntut oleh suatu negara.

Sikap yang “ Real Politic “ dari Amerika Serikat dalam permasalahan senjata nuklir Iran ini merupakan perwujudan bahwa segala keputusan yang menghasilkan politik luar negeri tidak dirancang sepihak oleh pemerintah dan badan-badan pembuat keputusan politik luar negeri saja, tetapi juga melihat dan memutuskan berdasar kelompok kepentingan nasional di Amerika Serikat yang begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri. Amerika Serikat yang berkeinginan kuat untuk menguasai Timur Tengah dengan penyebaran sistem Kapitalisme ekonomi, politik dan militer, juga sangat mewaspada dan berupaya untuk memandulkan setiap kekuatan baru yang mungkin timbul untuk melawan keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah.

#### **F. Hipotesa**

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas dan dengan didukung oleh teori-teori yang dianggap dapat membantu analisa, maka penulis akhirnya sampai pada hipotesa bahwa sikap keras Amerika Serikat dalam menentang pengembangan senjata nuklir Iran disebabkan karena:

Program nuklir Iran berpotensi menjadi ancaman bagi kepentingan politik, ekonomi, dan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, karena Iran akan muncul sebagai kekuatan baru di Timur Tengah.

### **G. Jangkauan Penulisan**

Dalam membahas masalah tersebut, untuk menjaga kedisiplinan penulis terhadap masalah yang diangkat, penulis membatasi jangkauan penelitian ini dengan munculnya isu kepemilikan dan pengembangan nuklir Iran sebagai senjata pemusnah massal di mata dunia Internasional yang disebarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2004.

### **H. Metode Penelitian**

1. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan serta menganalisa data yang ada.
2. Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, melalui teknik ini data diambil dari berbagai sumber seperti buku, majalah, koran, internet dan sumber-sumber lainnya.

### **I. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

**A. Alasan Pemilihan Judul**

**B. Tujuan Penulisan**

- C. Latar Belakang Masalah
- D. Pokok Permasalahan
- E. Kerangka Dasar Teori
- F. Hipotesa
- G. Jangkauan Penulisan
- H. Metode Penelitian
- I. Sitematika Penulisan

## **BAB II PROFIL NUKLIR IRAN**

- A. Mengukur Kemampuan Militer Iran
- B. Program Nuklir Iran
  - B 1. Sejarah Nuklir Iran
  - B 2. Kepentingan Nasional Iran dalam Pengembangan Nuklir
- C. Isu Proliferasi Nuklir Iran

## **BAB III HUBUNGAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT DENGAN IRAN**

- A. Hubungan AS dengan Iran masa pemerintahan Reza Pahlevi
- B. Hubungan AS dengan Iran masa pemerintahan Imam Khomaini
- C. Hubungan AS dengan Iran masa pemerintahan Hashemi Rafsanjani
- D. Hubungan AS dengan Iran. masa pemerintahan Mohammad Khatami

## **BAB IV KEPENTINGAN AS DALAM PELARANGAN PENGEMBANGAN**

### **NUKLIR IRAN**

- A. Kepentingan Militer**
- B. Kepentingan Ekonomi**
- C. Kepentingan Politik**
- D. Potensi Iran Sebagai Kekuatan Baru di Timur Tengah**

## **BAB V KESIMPULAN**